

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lebih baik dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dan kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom memerlukan sumber daya dan dana untuk membangun daerahnya serta pelayanan masyarakatnya.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagai wujud manifestasi kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah dan salah satunya yang memberi kontribusi paling besar adalah pajak sarang burung walet. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di Jalan Mas Tumapel No.01 kabupaten Bojonegoro.

Bapenda merupakan SKPD yang diberi amanah oleh negara untuk menghimpun dana penerimaan pajak daerah. Bapenda memiliki pelayanan di bidang

pajak daerah yang melayani wajib pajak di kabupaten Bojonegoro yang akan membayarkan tagihan pajaknya. Pajak daerah ini mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), apabila penerimaan pajak daerahnya mencapai target maka kualitas PAD naik dan sebaliknya apabila penerimaan pajak tidak mencapai target maka kualitas PAD menurun. PAD merupakan sektor yang paling penting bagi Bapenda Bojonegoro karena sektor ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah serta untuk melaksanakan roda pemerintah.

Pendapatan Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah, semakin tinggi kualitas otonomi daerahnya maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Pajak daerah salah satunya pajak sarang burung walet ini mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Keunikan yang dimiliki dari industri walet ini yaitu menjadi istimewa karena harga jual yang masih menjadi primadona meskipun sekarang mengalami penurunan, selain itu keunikan lainnya hanya beberapa daerah saja yang memiliki industri walet karena tidak setiap daerah ada industri walet.

Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini penerimaan pajak daerah khususnya pajak sarang burung walet berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun 2015-2019 dan hasil wawancara yang diperoleh bahwa pendapatan pajak sarang burung walet selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target penerimaannya dan kontribusi terhadap

PAD akhirnya rendah. Untuk menentukan rendah tingginya penerimaan pajak sarang burung walet ditentukan dari karakteristik sarang burung waletnya.

Karakteristik sarang burung walet dilihat berdasarkan hasil yang diproduksi dari walet tersebut secara detail, mulai dari warna sarang waletnya ataupun dari segi yang lainnya karena harga jual walet ditentukan berdasarkan regional bukan nasional, semisal warna sarangnya terlalu putih akan menimbulkan pemikiran yang negatif dari pembeli akan mengira bahwa sarang walet yang warnanya terlalu putih dikasih dengan bahan sintetis, selain itu juga kebersihan sarangnya apabila masih ada bulu walet pada sarangnya akan berimbas terhadap harga jual sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajaknya, jadi pengusaha walet bebas menjual sarang waletnya dimanapun sesuai dengan keinginannya tidak harus menjualnya di daerah tempat usaha burung waletnya.

Tabel 1.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Tahun	PAGU Anggaran	Realisasi	%
Pajak Sarang	2015	32.000.000	25.175.000	78,67
	2016	32.000.000	25.225.000	78,83
Burung Walet	2017	33.600.000	23.375.000	69,57
	2018	35.280.000	25.142.000	71,26

	2019	38.100.000	23.425.000	61,48
Jumlah		170.980.000	122.342.000	72

Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Bapenda Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tidak mencapai target dari PAGU Anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat yang menyebabkan sarang burung tidak panen sehingga Wajib Pajak (WP) tidak dapat membayarkan pajak sesuai dengan waktu masa pajak tersebut. Kesimpulan dari latar belakang masalah tersebut pentingnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara kontinyu tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, mengangkat judul tugas akhir (TA) dengan judul : **“KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENERIMAAN PAD BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa rumusan masalah penting yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kontribusi pajak sarang burung walet pada penerimaan PAD di kabupaten Bojonegoro?

2. Apa saja faktor penghambat dalam penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Bojonegoro ?
3. Bagaimana sistem pembayaran pajak sarang burung walet di Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak sarang burung walet pada penerimaan PAD di kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak sarang burung walet di kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

1.4.1 Bagi Pembaca Lainnya

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta referensi dan bahan masukan bagi pembaca selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama mengenai kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD khususnya bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan acuan atau panduan untuk menyusun penelitian pada objek yang sama khususnya di bidang PAD serta dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kantor Bapenda Bojonegoro.

1.4.3 Bagi Bapenda Bojonegoro

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi saran dan solusi untuk Bapenda Bojonegoro terkait masalah yang ada.

1.4.4 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Laporan ini dapat menambah koleksi atau *repository* di Perpustakaan serta upaya untuk menjalin hubungan kerjasama antara instansi dengan Bapenda.

